

Laporan Studi Lapangan

Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Perekonomian Rakyat

Oleh
Tim Redaksi

Ketika gelombang krisis ekonomi global terus menguat, semua sektor perekonomian dari hulu hingga hilir merasakan getarannya. Pada bagian hilir tentu berkaitan dengan aktivitas perekonomian rakyat yang berskala menengah ke bawah. Mengingat sektor perekonomian rakyat itu menyerap jumlah tenaga kerja terbesar, maka tim redaksi menelusuri aktivitas mereka di berbagai daerah, terutama industri kecil yang berorientasi pada ekspor. Kota yang menjadi lokasi studi lapangan ini meliputi Padang, Bandung, Jepara, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Makassar yang selama ini memiliki sentra industri kecil yang produknya mampu masuk ke pasar global.

Dampak Krisis Terhadap Perekonomian Rakyat

Krisis ekonomi global yang berlangsung sekarang penting untuk dicermati dampaknya terhadap perekonomian rakyat, khususnya terhadap sektor-sektor ekonomi menengah dan kecil, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan kesejahteraan penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia sebagian besar masih tergantung pada sektor kecil dan menengah, yang dalam perkembangannya sangat tergantung bukan hanya pada perekonomian nasional, tetapi juga pada perekonomian pasar global. Gejala krisis ekonomi yang terjadi pada pasar global, mungkin saja bisa diatasi di tingkat nasional, terutama oleh sektor ekonomi berskala besar, tetapi tidak halnya dengan sektor ekonomi kecil dan menengah, yang posisinya sangat lemah dan rentan berhadapan dengan kekuatan ekonomi pasar global.

Sistem ekonomi pasar global sendiri, dengan kekuatan utama arus dan ekspansi pasar bebas, kini sangat dominan menguasai bukan hanya pasar global, tetapi juga pasar domestik dan lokal. Sistem ekonomi ini membentuk jaringan ekonomi pertukaran dan aktivitas perdagangan (*economic webs*) berskala global, mempertautkan

para pelaku ekonomi, sektor ekonomi berskala kecil, menengah dan besar, dalam kepentingan bersama di atas berlakunya sistem ekonomi pasar bebas yang kompetitif. Tidak dikenal batas-batas antar negara dalam sistem ekonomi ini, pertukaran ekonomi dan aktivitas perdagangan dari para pelaku ekonomi, antara produsen dan konsumen, berlangsung begitu luas membentuk jaringan hubungan ekonomi lintas negara.

Ketergantungan antar pelaku ekonomi tidak bisa terhindarkan dalam sistem ekonomi pasar global lintas negara ini. Oleh karena itu, begitu gejala krisis pasar global terjadi, hal itu akan berdampak, dan seringkali memukul sektor ekonomi berskala kecil dan menengah di negara-negara sedang berkembang, yang kondisinya sangat tergantung dan rentan pada perubahan-perubahan gejala ekonomi di tingkat global. Dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional, khususnya perekonomian rakyat, terhadap sektor ekonomi berskala kecil dan menengah, dapat dicermati dari terbentuknya jaringan dan ketergantungan pelaku ekonomi sektor ini, dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan mereka, terkait

dengan ekonomi pasar global.

Dalam bekerjanya sistem ekonomi pasar global ini, para pelaku ekonomi di tingkat global, khususnya sektor industri berskala global, atau korporasi internasional, dalam aktivitas produksi mereka, sangat tergantung pada ketersediaan bahan-bahan baku material produksi dari negara-negara sedang berkembang yang kaya akan sumberdaya alam. Globalisasi dan ekspansi ekonomi mempertautkan mereka dengan sektor-sektor ekonomi berskala kecil dan menengah di dalam negeri, sebagai pengeksport untuk memenuhi permintaan bahan baku material produksi yang meningkat dari negara-negara industri maju di pasar global.

Sebaliknya, sebagai akibat dari ekspansi pasar global dan globalisasi ekonomi, penduduk negara-negara sedang berkembang sangat tergantung pada produksi luar negeri yang beredar di pasar global, sebagai pengimpor dan konsumen barang-barang produksi luar negeri. Besarnya jumlah penduduk di negara-negara sedang berkembang merupakan pasar potensial bagi pelaku ekonomi pasar global. Ekspansi pasar global dan globalisasi ekonomi ini menciptakan ketergantungan ekonomi tersendiri dari pelaku ekonomi domestik, sektor ekonomi berskala menengah dan kecil, terhadap pasar global.

Dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian dan kesejahteraan penduduk selain dapat dilacak dari ketergantungan mereka sebagai pemasok atau pengeksport bahan baku material produksi dari negara-negara industri maju, juga dalam posisinya

sebagai konsumen produk ekonomi yang beredar di pasar global. Lemah atau rentannya posisi sektor ekonomi berskala kecil dan menengah di dalam negeri dihadapan sektor ekonomi besar di pasar global membuat dampak krisis ekonomi global sangat nyata mempengaruhi tingkat ekonomi dan kesejahteraan penduduk dalam negeri.

Kebijakan pemerintah melindungi sektor ekonomi menengah dan kecil sangat penting diharapkan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian dan kesejahteraan penduduk ini. Melalui regulasi ekonomi dan kebijakan memberdayakan sektor ekonomi menengah dan kecil, pemerintah bisa memperkuat posisi tawar sektor ini terhadap gejolak ekonomi pasar global. Kebijakan bukan hanya dilakukan di tingkat global, dengan menambah posisi tawar sektor ekonomi domestik dihadapan pelaku-pelaku ekonomi pasar global, melalui perjanjian-perjanjian perdagangan bilateral dan multi-lateral yang fair dan seimbang, tetapi juga secara langsung memberikan stimulus kebijakan, proteksi dan solusi atas masalah dan segala dampak buruk yang menimpa sektor ekonomi menengah dan kecil akibat krisis ekonomi terjadi di tingkat global.

Studi lapangan ini melacak dampak krisis ekonomi global terhadap kinerja atau performa sektor ekonomi berskala kecil dan menengah, dari jaringan dan ketergantungan mereka pada ekonomi pasar global, dalam aktivitas ekonomi ekspor dan impor mereka, dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk, khususnya pekerja, sebagai pemrodusen bahan baku maupun konsumen produksi ekonomi dalam pasar bebas kompetitif yang berlaku sekarang.

Pertanyaan krusial studi ini adalah: (1) Bagaimana dampak krisis ekonomi pasar global terhadap performa dan kinerja sektor ekonomi berskala kecil dan menengah; (2)

bagaimana strategi penyesuaian dan strategi bertahan hidup sektor ekonomi menengah dan kecil dalam merespon krisis ekonomi pasar global; dan (3) ingin mengetahui persepsi pelaku usaha kecil dan menengah terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus, regulasi, proteksi dan memberdayakan sektor ekonomi menengah dan kecil untuk mengatasi dan mengurangi dampak buruk krisis ekonomi global pada perekonomian rakyat.

Dari tinjauan lapangan terdapat beberapa temuan menarik yang selanjutnya dapat menjadi bahan diskusi dalam upaya memberikan masukan kebijakan pemerintah. Paling tidak ada tiga hal penting yang perlu memperoleh perhatian, antara lain bahwa krisis ekonomi global sekarang ini membuat industri berorientasi ekspor mengalami tekanan hebat, strategi bertahan yang dipakai untuk menghadapi krisis, dan persepsi serta harapan pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah berkait dengan langkah antisipatif menghadapi dampak buruk krisis ekonomi global.

Industri Kecil Berorientasi Ekspor Terpukul

Di tengah turbulensi ekonomi global sekarang ini, sub-sektor industri kecil yang mengandalkan pada pasar global terkena guncangan hebat. Industri garmen, kerajinan, dan furniture terpukul sehingga harus mengurangi produksi. Pesanan yang sebelumnya datang cukup mengalir deras dari pasar internasional, sekarang terasa surut cukup signifikan. Pengakuan dari para pengusaha dan pengrajin di berbagai daerah bernada sama, yaitu kian sepi pesanan barang akibat menurunnya daya beli masyarakat Amerika Serikat dan Eropa yang selama ini menjadi pasar utama produk industri kerajinan dan garmen. Memang masih ada beberapa pesanan yang datang dari kedua benua tersebut, tetapi volumenya jauh menurun.

Industri kayu olahan di Jepara misalnya, yang menjadi potensi pasar tradisional, terus mengalami penurunan produksi sebagai akibat dari krisis ekonomi global. Kepala Humas Pemda Kabupaten Jepara, Hadi Priyanto, memberikan informasi bahwa secara riil nilai ekspor furnitur Jepara ke seluruh negara tujuan ekspor pada triwulan III tahun 2008 mengalami penurunan hampir 30% atau turun dari \$ 29.094.125,23 menjadi \$ 22.412.962,61 bila dibandingkan periode ASPA tahun sebelumnya. Bahkan mulai Oktober 2008 hingga akhir tahun terjadi penurunan hampir 60 % untuk nilai ekspor Jepara ke Amerika Serikat. Penurunan ini diperkirakan akan terus terjadi, mengingat pesanan untuk triwulan I tahun 2009 sudah banyak yang dibatalkan. Fakta ini diperkuat oleh pengakuan sejumlah pedagang di sentra pasar industri Jepara, bahwa dalam lima bulan terakhir ini jarang sekali turis Eropa dan AS yang datang ke Jepara. Hanya turis dari Malaysia yang masih agak banyak.

Penurunan dan bahkan pembatalan pesanan handicraft juga terjadi di Bali. Sekretaris Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, Gde Weda Arjawa, mengungkapkan

meski pada prinsipnya nilai produksi barang-barang kerajinan di Bali tidak begitu drastis penurunannya, tetapi dengan semakin turunnya pesanan, terutama yang dari Amerika Serikat, ke depan dampak krisis global ini semakin mencemaskan. Ekspor kerajinan Bali, 40 % ke Amerika Serikat, 40 % ke Eropa, dan sisanya di beberapa negara Asia dan Australia. Kepala Disperindag Bali, Gede Darmaja, memberikan keterangan bahwa sebagai dampak krisis ekonomi global, nilai ekspor barang-barang kerajinan Bali pada bulan Januari 2009 mengalami penurunan mencapai 70 % jika dibandingkan dengan bulan Januari 2008.

Direktur *Barang Handicraft Centre Producer & Exporter*, Made Djabur, menuturkan bahwa dampak krisis ekonomi global juga dirasakan oleh exporter karena banyak *buyers/customer* mengurangi pesanan dan hampir juga tidak datang lagi. Bahkan yang dari negara-negara Eropa ada *buyer* sudah tutup tidak dapat melanjutkan lagi usahanya. Dahulu ada beberapa dari Amerika Serikat, tetapi sekarang sudah tidak lagi melakukan transaksi dan meminta pesanan. Barang industri kerajinan yang diekspor meliputi kerajinan berupa asesoris dan patung, sekarang mengalami penurunan hingga 50 %.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahsan, Sekretaris Asosiasi Pengrajin Gerabah Kota Mataram NTB, yang mengatakan secara keseluruhan semua pengusaha dan pengrajin terkena dampak krisis ekonomi global. Perusahaan dan industri seperti gerabah, anyaman, kerajinan rotan/ bamboo, tenun songket dan emas perak mengalami penurunan produksi cukup signifikan. Oleh karena industri ini berkait dengan industri pariwisata, maka berbanding lurus dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan asing dan efisiensi belanja yang mereka lakukan. Ketika hotel di perkotaan mengalami penurunan tingkat hunian sekitar 25%, sedangkan di daerah-

daerah termasuk di Senggigi mengalami penurunan mencapai sampai 60%, maka industri kerajinan banyak yang hampir gulung tikar. Selain itu ekspor mengalami penurunan lebih dari 50%. Kondisi ini juga diakui oleh pengrajin Gerabah, Rahmatuallah, dampak krisis ekonomi global sangat terasa, terjadi penurunan nilai pembelian rata-rata sampai 60%, dan bahkan lebih.

Sementara dari Bandung juga terjadi yang sama. Ketua Asosiasi Eksporthir Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Jawa Barat, Yanna Diah Kusumawati, mengatakan bahwa pada triwulan pertama tahun ini di Jabar diperkirakan akan terjadi penurunan penjualan hingga mencapai 60-80 % dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2008. Sedangkan Presiden Direktur PT Firman Jaya Dua Saudara, Eddy Soekwanto mengatakan, nilai ekspor tekstil sejak November 2008 mengalami penurunan. Jika sebelumnya ekspor setiap bulan sekitar empat kontainer, masing-masing berisi 20 ton tekstil, tetapi kini turun menjadi tiga kontainer. Nilai ekspor setiap kontainer sekitar 60.000 dollar AS. Produksi perusahaan itu juga turun dari kapasitas normal sekitar 1,2 juta meter per bulan menjadi 700.000 meter.

Dari Makassar adanya dampak krisis ekonomi global dirasakan pula oleh pengusaha yang bergerak di bidang penangkapan telur ikan. Salah seorang pengusaha Gasing, mengungkapkan bahwa telur ikan diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Penangkapan telur ikan ini telah ekspor ke Jepang dan Korea. Sejak terjadinya krisis ekonomi

global sekarang ini sangat dirasakan oleh Gasing. Untuk kuantitas hasil tangkapannya tidak mengalami penurunan sama sekali, bahkan mengalami kenaikan jumlah produksi. Namun hal itu tidak diimbangi dengan kenaikan nilai jumlah ekspor produknya, karena pasar di Jepang dan Korea mengalami penurunan secara drastis. Jika sebelumnya mampu menjual dengan harga Rp 250 ribu/kg, setelah terjadinya krisis harga tersebut menjadi Rp100 ribu/kg. Hingga saat ini tidak hanya penurunan harga yang dialaminya, tetapi sudah merambat ke penurunan jumlah pesanan ekspor. Hal ini dapat dilihat dari sisa hasil panen. Sebelum terjadinya krisis masa panen pada bulan Mei-Oktober, dan pada akhir pengujung atau pertengahan semua hasil panennya sudah habis terjual. Saat ini yang terjadi, hingga memasuki awal tahun hasil panen tahun lalu tidak habis terjual.

Gazali Kahar, Direktur Business information & SME's Service yang juga anggota Kadin Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa beberapa sektor usaha yang berorientasi ekspor ke beberapa negara maju sangat merasakan adanya dampak krisis ekonomi global. Ketika daya beli konsumen luar negeri menurun, maka sektor ini langsung terkena dampaknya, karena itu kondisi ini juga berpengaruh terhadap turunnya nilai ekspor Sulawesi Selatan. Nilai ekspor Sulsel periode Januari- November 2008 mencapai 2.040,015 juta dollar AS (sekitar Rp 2 triliun dengan kurs Rp10.000/dolar AS), turun sekitar 20,64 persen dibandingkan pada periode yang sama 2007 lalu sebesar 2.570,687 juta dollar AS (Rp2,3 triliun dengan kurs Rp9.000/dolar). Penurunan nilai ekspor Sulsel karena terimbas krisis ekonomi global, sehingga harga komoditas tertentu turun, khususnya harga nikel yang mengikuti harga pasar dunia.

Sementara itu di Surabaya juga mengindikasikan kecenderungan yang sama. Seorang anggota DPRD yang membidangi bidang perekonomian,

Marmudin, mengungkapkan adanya dampak penurunan ekspor sebagai akibat kondisi ekonomi dunia saat ini. Perdagangan di kota Surabaya diperkirakan juga turun, khususnya ekspor karena kondisi ekonomi dunia yang kurang baik. Tahun 2009 nilai ekspor bahkan diperkirakan akan turun 20%. Marmudin mencontohkan bahwa di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang merupakan sentra industri, saat ini terdapat sekitar 400-an perusahaan Korea yang bergerak diberbagai bidang. Itu belum termasuk perusahaan-perusahaan asing lain dan juga perusahaan lokal. Akibat krisis keuangan global, perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sepi mendapat order dari luar negeri, terutama Amerika dan Eropa. Pilihan terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan merumahkan karyawan. Baik berupa PHK, atau merumahkan sementara.

Marmudin sendiri mengaku tidak tahu persis berapa angka jumlah korban PHK di kota Surabaya. Tetapi untuk Jawa Timur akibat dampak krisis global kali ini korban PHK sudah mencapai 9 ribu lebih. Namun, sejauh pengamatannya, dampaknya tidak sebesar seperti yang terjadi di Jawa Tengah, Jakarta atau Jawa Barat. Namun demikian, dia mengkhawatirkan krisis global kali ini akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran terbuka di kota Surabaya sebagai daerah basis industri. Menurut Marmudin jumlah pengangguran terbuka di Surabaya tahun 2008 telah mencapai 85.557 orang. Diperkirakan, tahun 2009 angkanya akan bertambah menjadi 171.986 sebagai dampak melemahnya perekonomian terkait krisis kali ini.

Hanya saja memang, saat ini di Surabaya dan Jawa Timur umumnya belum terjadi PHK besar-besaran seperti terjadi di daerah lain seperti Jabodetabek. Dari data yang ia peroleh, menurutnya, PHK di Jawa Timur akibat krisis saat ini berjumlah sekitar 14 ribuan orang. Yang sesungguhnya cukup

mengkhawatirkan saat ini adalah ancaman PHK besar-besaran yang akan dilakukan beberapa perusahaan terkait kebijakan UMK/UMR yang dikeluarkan Gubernur. Belum adanya titik temu antara para pelaku usaha dan pemerintah daerah terkait SK Gubernur ini dikhawatirkan akan mengancam keberadaan ratusan ribu karyawan di beberapa perusahaan.

Menurut pengamatannya, kebijakan terkait kenaikan UMK/UMR oleh Gubernur saat ini memang rumit dan rawan dipolitisir pelaku usaha untuk melakukan PHK. Gambarnya kira-kira begini. Pada akhir tahun serikat buruh di Surabaya dan Sidoarjo meminta kenaikan upah. Akhirnya Gubernur Jatim mengeluarkan SK kenaikan UMK/UMR dari 800 ribuan lebih menjadi 900 ribuan lebih. Yang menjadi problem adalah keluarnya SK kenaikan upah ini bersamaan dengan kondisi krisis global yang tengah melanda. Ratusan perusahaan yang berada di kawasan Surabaya saat ini tidak mampu kalau harus membayar upah seperti dalam SK Gubernur di tengah sepihnya order dan permintaan pasar. Kalau mereka harus

tetap membayar sesuai standar upah yang baru, maka satu-satunya jalan yang bisa di tempuh adalah dengan melakukan PHK terhadap karyawan.

Pengamat ekonomi Unibraw ini menilai, krisis global saat ini memang bisa dijadikan tameng para pelaku usaha untuk tidak menaikkan upah dengan ancaman PHK. Mereka bisa berdalih bahwa dengan distopnya permintaan order luar negeri, lesunya pasar, menurunnya ekspor karena krisis global, mereka tidak mungkin menaikkan upah. Yang mereka pikirkan justru menyelamatkan perusahaan agar tidak tutup dan menghindari PHK secara besar-besaran. Kalau pemerintah daerah tetap ngotot menaikkan upah buruh di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, maka PHK adalah satu-satunya pilihan. Padahal menurut Faisal, dampak krisis memang terjadi, tetapi imbasnya, khususnya untuk wilayah kawasan industri Surabaya dan Sidoarjo, tidak terlalu besar. Mungkin hanya sektor manufaktur yang agak terimbas hebat karena perusahaan semacam ini memang berorientasi ekspor. Sementara industri makanan yang banyak tersebar relatif cukup stabil. Karena itu, lanjut Faisal, pengusaha juga harus fair dan tidak hanya berlindung dibalik fenomena krisis global ini. Data empiris yang ia peroleh, 8 dari 10 orang yang bekerja di kontraktor itu di PHK.

Karena itu menurut pengamat yang juga aktif di beberapa program

founding internasional ini, keadaan ini jelas pelik dan harus dipikirkan jalan keluarnya. Pengusaha diminta juga tidak mengambil untung dan hanya berlindung dibalik krisis global saat ini, sementara pemerintah juga harus mencari terobosan berupa kebijakan agar pasar domestik bisa bergairah. Pemerintah daerah harus mengeluarkan paket kebijakan yang dapat menaikkan income masyarakat. Misalnya program padat karya bagi korban PHK, menghentikan pengurusan atas PKL dan paket stimulus lain yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terjadinya PHK massal yang disinyalkan para pengusaha jelas harus dihindari. Karenanya, di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, pengusaha, pemerintah daerah dan pekerja harus duduk untuk mencari penyelesaian yang terbaik.

Faisal juga menilai bahwa paket stimulus yang digulirkan pemerintah pusat gaungnya tidak seberapa dan dia yakin tidak akan berimbas banyak. Menurutnya, paket stimulus seringkali hanya dinikmati kalangan elit, industri-industri besar dan jarang yang menetes ke industri kecil yang sebenarnya justru menjadi katub penampung tenaga kerja. Sampai saat ini dia tidak melihat adanya dukungan serta proteksi pemerintah daerah menyikapi dampak krisis, terutama yang diberikan untuk industri-industri kecil.

Harapan terhadap Pemerintah

Pemerintah telah merespons terhadap akibat buruk adanya krisis ekonomi global, dengan mengeluarkan paket stimulus yang diharapkan akan dapat membantu pengusaha yang bergerak di sektor industri berorientasi ekspor. Untuk memperkecil dampak negatif krisis keuangan global itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskal, guna menyelamatkan perekonomian nasional tahun 2009 dari krisis global,

antara lain dengan memperluas program stimulus ekonomi melalui APBN 2009, melakukan perubahan terhadap beberapa asumsi ekonomi makro yang dirasakan sudah tidak lagi realistis, dan penyesuaian berbagai besaran pendapatan negara, belanja negara serta defisit dan pembiayaan anggaran.

Kebijakan stimulus dilakukan melalui tiga cara dan sekaligus untuk tiga tujuan. Pertama, mempertahankan dan atau meningkatkan daya beli

masyarakat untuk dapat menjaga laju pertumbuhan konsumsi di atas empat persen atau mendekati 4,7 persen. Kedua, mencegah pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha menghadapi krisis ekonomi dunia. Dan, ketiga, menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat pengangguran dengan belanja infrastruktur padat karya.

Peningkatan daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan tarif PPh Orang Pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak, pemberian subsidi harga untuk obat generik dan minyak goreng, dan PPN untuk produk akhir ditanggung pemerintah (DTP), penurunan harga BBM, kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dan pensiunan guru/dosen, dan pemberian BLT.

Dari sisi perpajakan, dalam APBN 2009 telah dimasukkan penurunan tarif pajak orang pribadi sebagai hasil dari diberlakukannya amandemen UU PPh. Dengan demikian pendapatan riil masyarakat meningkat sehingga diharapkan akan mampu mendorong daya beli. Penurunan tarif PPh orang pribadi memberikan pengurangan pembayaran pajak (*tax saving*) sebesar Rp 24,5 triliun, yang akan menambah likuiditas perekonomian dan mendorong daya beli rumah tangga.

Stimulus fiskal yang diberikan untuk wajib pajak orang pribadi akan meringankan beban masyarakat sebesar Rp 24,5 triliun. Stimulus ini terdiri atas penyederhanaan dan penurunan tarif per lapisan penghasilan untuk WP orang pribadi (tarif tertinggi dari 35 persen menjadi 30 persen), memberikan dampak sebesar

Rp 13,5 triliun, dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak dari Rp 13,2 juta mejadi Rp 15,8 juta per individu memberikan dampak sebesar Rp 11 triliun. Dari sisi belanja negara, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah telah menetapkan kebijakan menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebesar 15 persen dan pemberian gaji ke-13, serta pemberian BLT bagi 18,2 juta rumah tangga sasaran selama dua bulan dengan pembayaran Rp 100 ribu per bulan per RTS.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan suatu paket stimulus yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari terjadinya krisis ekonomi global terhadap masyarakat sebesar Rp 1,41 triliun. Stimulus itu terdiri dari subsidi PPN DTP atas minyak goreng Rp 800 miliar dan subsidi PPN DTP atas bahan bakar nabati Rp 200 miliar, serta subsidi minyak goreng Rp 210 miliar, dan subsidi obat generik Rp 200 miliar. Peningkatan daya saing dan daya tahan usaha dan ekspor ditempuh melalui penurunan tarif PPh badan dan perusahaan terbuka, pemberian fasilitas bea masuk DTP, PPh pasal 21 dan 25 DTP, PPN DTP, potongan tarif listrik untuk industri, penurunan harga solar, dan penyertaan modal negara dalam rangka kredit usaha rakyat dan penjaminan ekspor.

Di sisi belanja negara, pemerintah juga telah menyiapkan suatu paket stimulus yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari terjadinya krisis ekonomi global terhadap daya saing dan daya usaha dan ekspor sebesar Rp 16,4 triliun. Stimulus itu terdiri dari bea masuk sebesar Rp 2,5 triliun, insentif PPh panas bumi Rp 0,8 triliun, fasilitas PPh pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah sebesar Rp 6,5 triliun, potongan tarif listrik untuk industri sebesar Rp 1,4 triliun, penurunan harga solar sebesar Rp 2,8 triliun dan subsidi bunga untuk perusahaan air minum Rp 15 triliun.

Pemberian stimulus fiskal juga dilakukan melalui pemberian PMN kepada Asuransi Ekspor Indonesia

untuk memperkuat dana penjaminan ekspor sebesar Rp 1 triliun dan PMN kepada Jamkrindo dan Askrindo dalam rangka penjaminan KUR sebesar Rp 1 triliun.

Penciptaan lapangan kerja dan pencegahan/pengamanan dampak PHK dilakukan melalui penambahan anggaran untuk infrastruktur yang terkait dengan bencana alam, proyek tahun jamak, jaringan kereta api, instalasi pengolahan air minum, perumahan rakyat, pemangkit dan transmisi listrik, rehabilitasi jalan, usaha tani, pelabuhan, pasar, serta pembangunan infrastruktur perdagangan pangan. Untuk menciptakan kesempatan kerja dan penyerapan dampak PHK, pemerintah akan mengalokasikan stimulus fiskal sebesar Rp 8,376 triliun yang akan digunakan untuk belanja infrastruktur sebesar Rp 7,775 triliun, dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) sebesar Rp 601,5 miliar.

Dari hasil studi lapangan ini, sejumlah informan yang dihubungi memberikan persepsi yang beragam terhadap paket stimulus tersebut. Pada prinsipnya mereka memahami bahwa paket tersebut secara normatif memang bagus, tetapi implementasi di lapangan seringkali masih belum sesuai dengan harapan. Sebagai ilustrasi misalnya, tentang upaya peningkatan daya beli yang kurang direspons secara cepat oleh Pemerintah Daerah dengan cara meningkatkan upah minimum. Di Jabar, Jateng, Jabar, Bali, Sulsel, dan NTB belum menetapkan upah minimum baru sejak dikeluarkannya paket stimulus Pemerintah pusat. Padahal daya beli masyarakat sudah menurun cukup signifikan, sebagai akibat krisis ekonomi global.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi berpendapat bahwa transmisi persoalan penurunan daya beli adalah minimnya kenaikan pendapatan nominal tenaga kerja pada industri-industri yang pasarnya terpengaruh krisis ekonomi global.

Sektor tersebut di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil yang pasarnya terpengaruh krisis ekonomi global. Kartabi berpendapat bahwa kaitan antara krisis daya beli dan krisis ekonomi global harus dilokalisasi dampaknya melalui upaya mempertahankan tingkat produksi. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu mengurangi dampak imported inflation terhadap biaya produksi, menjaga stabilitas kurs, dan mengurangi masuknya barang impor.

Pengetatan impor pakaian jadi oleh Pemerintah, khususnya pakaian bekas, menjadi berkah bagi bisnis distro di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Bali. Akan tetapi menurut Ketua Kamar Dagang Jabar, Agung Sutisna, pelemahan daya beli masyarakat akhirnya akan memukul sektor industri dan perdagangan. Ia mencontohkan, penurunan daya beli telah berdampak pada lesunya pasar dalam negeri untuk produk tekstil.

Sementara itu di bidang industri kerajinan, peran pemerintah sangat diharapkan untuk menjembatani mediasi perdagangan kerajinan antarpulau di Indonesia. Selama ini perdagangan dan promosi antarpulau saat ini kebanyakan masih diakomodasi para pengrajin sendiri. Pemerintah masih belum memberikan dukungan, padahal potensi pasar nasional cukup bagus, sehingga jika pemerintah memberikan bantuan dalam promosi kiranya akan memperluas pasar nasional yang bisa menjadi alternatif baru saat pasar global sedang lesu.

Sedangkan menyangkut paket kebijakan stimulus bidang fiskal dinilai kurang

begitu efektif. Kebijakan ini alih-alih menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit yang menghantui sektor riil akibat tekanan ekonomi global, pemerintah malah dinilai kurang mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Bagi pelaku dunia usaha, kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah ibaratnya hanya pijat refleksi kaki, padahal yang sakit justru jantung. Pemerintah terlalu sibuk membicarakan krisisnya, tetapi korban krisis, yaitu kalangan dunia usaha, kurang dibicarakan. "Perlindungan terhadap dunia usaha sangat lemah, tidak ada sesuatu yang riil yang dilakukan pemerintah untuk melindungi korban krisis ekonomi global", demikian kecenderungan pendapat yang datang dari kalangan pengusaha di Padang, Bandung, Surabaya, dan Jepara.

Dalam kaitannya dengan masalah PHK, dukungan nyata pemerintah dalam mengatasi dampak krisis ini menurut Anggota DPRD Kota Surabaya, Marmudin, menjadi amat mendesak. Perlu langkah-langkah konkrit dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dapat meminimalisir dampak krisis, termasuk mereka yang terkena PHK. Tapi, sayangnya ada sesuatu yang paradoks dalam penggunaan anggaran kota Surabaya, yakni banyak sisa anggaran yang tidak terserap. Dia mencontohkan, pendapatan kota Surabaya tidak mengalami penurunan, malah cenderung naik. Sektor perdagangan, hotel, restoran dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang dinilai menyumbang banyak atas PDRB. Tapi sayangnya, pemerintah kota justru tidak mampu menyerap anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk program-program padat karya bagi korban PHK atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, lanjut Marmudin, di tengah situasi krisis yang berdampak terhadap berbagai sektor industri kecil, sisa anggaran tersebut

seharusnya bisa digunakan sebagai dukungan proteksi atau stimulus untuk melakukan pemberdayaan terhadap sektor ekonomi kecil untuk meminimalisir dampak krisis. Bukan malah menyimpannya dalam bentuk deposito. Akibatnya, sisa anggaran berlebih dan deposito kota Surabaya meningkat, sementara pada saat bersamaan banyak hal yang seharusnya bisa mendapat dukungan dari anggaran tersebut, terutama bidang ekonomi, menjadi terabaikan.

Rasionalitas ekonomi seperti apa yang dilakukan para korban PHK? Marmudin melihat bahwa para korban PHK banyak yang beralih profesi dan banting setir ke sektor-sektor informal. Menjamurnya PKL-PKL yang menggunakan mobil pick-up yang menjajakan berbagai produk, para penjual nasi dan dagangan lainnya di alun-alun kota yang kian banyak adalah fenomena yang terjadi belum lama. Dia menduga, tindakan kreatif tersebut dilakukan oleh mereka yang terkena PHK. Karena fenomena tersebut terjadi belum lama. Namun, lanjut Marmudin, hal tersebut masih hipotesis sementara. Perlu kajian lebih lanjut. Pemkot dalam hal ini seharusnya lebih peka menyikapi dampak krisis global.

D. Kesimpulan

Dari hasil temuan di lapangan, beberapa poin penting dapat ditarik sebagai kesimpulan, yang secara rinci adalah sebagai berikut.

Pertama, krisis ekonomi global ternyata mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan produksi industri kecil yang berorientasi ekspor, terutama garmen dan industri kerajinan. Pasar Eropa dan Amerika Serikat yang selama ini menjadi tujuan utama produk industri rakyat seperti garmen dan kerajinan, mengalami kelesuan, sehingga mempunyai pengaruh terhadap penurunan volume produksi dan perdagangan. Dampak lebih lanjut adanya kondisi tersebut, adalah bahwa tingkat kesejahteraan rakyat yang bergerak pada industri kerakyatan yang berorientasi ekspor tersebut terasa mulai menurun. Fenomena kebangkrutan pada industri kerajinan dan garmen sudah mulai terlihat, dan beberapa sektor formal yang bergerak di kedua sektor tersebut juga sudah ada yang melakukan PHK.

Kedua, meski dalam tekanan sebagai akibat krisis ekonomi global, tetapi sektor industri kecil yang berorientasi ekspor tetap memiliki kemampuan dalam bertahan. Beberapa strategi yang mereka tempuh adalah memperluas pasar nasional, meningkatkan kemampuan berinovasi, dan membidik pasar Timur Tengah dan Afrika. Bahkan beberapa industri kecil justru tumbuh pada saat krisis ekonomi global sekarang ini, terutama industri yang berbasis industri kreatif. Meskipun baru tahap rintisan, tetapi pasar produk industri kreatif semakin berkembang, bahkan kemampuan merambah ke pasar internasional sangat potensial di masa mendatang. Beberapa wisatawan mancanegara, sudah mulai tertarik dengan produk industri kreatif ini, terutama yang datang dari Jepang, Korea, China, Malaysia, dan Taiwan.

Ketiga, para pelaku usaha pada prinsipnya memahami terhadap kebijakan pemerintah berupa paket stimulus dalam menghadapi krisis

ekonomi global. Akan tetapi mereka mempunyai persepsi yang beragam, ada yang optimis dan ada yang pesimis. Akan tetapi mereka sangat berharap bahwa paket stimulus tersebut hendaknya ditindaklanjuti secara serius hingga implementasinya di lapangan. Melalui monitoring yang ketat dan kontinyu, maka berbagai paket kebijakan stimulus tersebut diharapkan akan tepat sasaran dan mempunyai kontribusi positif terhadap upaya meringankan beban rakyat akibat tekanan krisis ekonomi global.

Akhirnya, dalam menghadapi krisis ekonomi global sekarang ini, semua informan dari hasil studi ini sepakat perlunya semua pihak bekerja sama. Upaya membuat pasar yang lebih fleksibel, seperti relokasi, substitusi input, konsumsi, maupun orientasi pasar mutlak dilakukan oleh pemerintah. Mengingat pola krisis ini berbeda dibandingkan dengan krisis moneter di Indonesia 1998, di mana industri dan atau produk-produk pertanian dan produk industri kerajinan berorientasi ekspor yang akan lebih terpukul, maka sejumlah informan berharap pada pemerintah agar bagaimana penguatan pasar domestik perlu diupayakan secara serius. Adapun untuk menguatkan daya saing ke luar, diversifikasi produk berbasis kekayaan alam serta produk-produk inovatif berbasis tradisi dan budaya bangsa sudah waktunya dijadikan andalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Dennis (1982), "Small Industry in Developing Countries", World Development, November.
- Bachruddin, Zaenal, Mudrajad Kuncoro, Budi Prasetyo Widyobroto, Tridjoko Wisnu Murti, Zuprizal, Ismoyo (1996), Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil, LPM UGM dan Balitbang Departemen Koperasi & PPK, Yogyakarta.
- BPS (1999). Statistical Yearbook of Indonesia 1998. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Bank Indonesia (BI) (2009), "Kurs Bank Indonesia". <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Kurs+Bank+Indonesia/Kurs+Transaksi/>. Diakses 12 Januari 2009.
- BI (2008), Laporan Neraca Pembayaran Indonesia: Realisasi Triwulan III 2008, Jakarta: BI, November.
- BI (2009), Laporan Neraca Pembayaran Indonesia: Realisasi Triwulan IV 2008, Jakarta: BI, Maret.
- Bursa Efek Indonesia (BEI) (2009), "IDX Statistic". <http://www.idx.co.id/JSXStatistics/MONTHLY/tabid/184/language/en-US/Default.aspx>. Diakses 12 Januari 2008
- Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) (2008), Memahami Krisis Keuangan Global: Bagaimana Harus Bersikap, Jakarta: Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
- Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) (2008), TANYA JAWAB; Memahami Krisis Keuangan Global: Bagaimana Pemerintah Mengatasinya. Jakarta, Depkominfo
- Dowling, J. Malcolm, & Ma, Rebecca Valenzuela (2004), Economic Development in ASIA, Singapura: Thomson Learning.
- Globe Asia (2009), Global Economic Forecast for 2009: Will Demand for Good News Outpace Supply?, Global Asia, Volum 3 Nomer 2 - Februari 2009
- Hariato, Farid (1996), "Study on Subcontracting in Indonesian Domestic Firms", dalam Mari Pangestu (ed.), Small-Scale Business Development and Competition Policy, CSIS, Jakarta.
- Hill, Hal (1998), "The Indonesian Economy: The Strange and Suddenth Death of a Tiger" dalam Forrester, Geoff & R.J. May (eds.), The Fall of Soeharto, Bathurst: Crawford House Publishing Pty Ltd.
- ILO (International Labour Organization) (2007), The Promotion of Sustainable Enterprises, Geneva: International Labour Office.
- International Monetary Fund (IMF) (2008), World Economic Outlook Update November 2008, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/update/03/pdf/1108.pdf>. Diakses 21 Januari 2009.
- Kompas (2008), "Fondasi Ekonomi Kuat: Sebaiknya Utamakan Penguatan Perbankan Daripada Pasar Modal", Kompas, 13 Oktober 2008. <http://epaper.kompas.com/>. Diakses 14 Oktober 2008.
- Kompas (2009), "Stimulus Ekonomi". Kompas, 7 Maret 2009. <http://epaper.kompas.com/>. Diakses 7 Maret 2009.
- Krugman, Paul (1997), "What Ever Happened to the Asian Miracle?" Fortune Magazine, August 18, 1997, p. 27.



Kuncoro, Mudrajad (2007), "Moratorium Kredit UMKM", Kedaulatan Rakyat, <http://www.kr.co.id/article.php?sid=129397>, Rabu 4 Juli 2007.

Kuncoro, Mudrajad (2007), "Akselerasi Sektor Riil dan UMKM", Investor Daily, <http://www.investorindonesia.com>, 20 Juni 2007.

Kuncoro, Mudrajad, Zainal Arifin, Andryan Setyadharna (2008), Evaluasi Paket Kebijakan Inpres No 6/2007 Bidang Perbaikan Iklim Investasi, Perdagangan, Pemberdayaan UMKM, dan Infrastruktur. Jakarta: Partnership.

Kuncoro, Mudrajad (2008), "Urgensi Stimulasi Kebijakan di Tengah Krisis", Suara Pembaruan, <http://202.169.46.231/News/2008/12/01/index.html>. 2 Desember 2008.

Kuncoro, Mudrajad (2008), "Strategi Pengembangan UMKM Di Tengah Krisis Keuangan Global", Oktober 2008.

Kuncoro, Mudrajad, (2008), "Stimulus Ekonomi", Investor Daily, Minggu 11 Januari 2009.

Kuncoro, Mudrajad (2008), "Antisipasi Resesi dan Gejolak Ekonomi Global", Majalah GATRA, No. 12 Tahun XIV, 31 Januari-06 Februari 2008.

Kuncoro, Mudrajad (2008), "Keamanan Energi dan Pangan", Investor Daily, http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53698, 14 April 2008.

Leeb, Stephen (2006), *The Coming Economic Collapse: How You Can Thrive When Oil Costs \$200 a Barrel*, New York: Warner Business Books.

Menko Perekonomian (2009), Laporan Evaluasi Ekonomi 2008 dan Proyeksi Ekonomi 2009. <http://www.ekon.go.id/images/publikasi/Laporan%20Ekonomi.pdf>. Diakses 21 Januari 2009.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (2008) Press Release Akhir Tahun 2008, http://www.ksei.co.id/_contents/_5/I_Press%20Release/2008/PRESS%20RELEASE-Akhir%20Tahun%202008-FINAL.pdf, Jakarta, 30 Desember.

Rao, Bhanoji (2001), *East Asian Economics: The Miracle, a Crisis and the Future*. Singapore: McGraw-Hill.

Suara Karya (2009), "Kepemilikan Saham Asing Naik 10 Persen", Suara Karya Online, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=222013>, 7 Maret 2009.

World Bank (2009), *Global Economic Prospects: Commodities at the Crossroads*. Washington, DC: World Bank.

World Bank (2009), *World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*. Washington, DC: World Bank.

AntaraneWS, 2009, PDB Indonesia Triwulan I Tumbuh 6,2-6,4 Persen, <http://www.antara.co.id>

BPS, 2009, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008, Berita Resmi Statistik, N0.11/02/Th.XII, 16 Februari 2009, Download Internet.

_____, 2006, Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005 – 2006, Berita Resmi Statistik, N0.47/IX/1 September 2006, Download Internet.



- Eisy, Muhammad, Ridlo, 1998, Kemiskinan dan Kelapan di Indonesia, Pikiran Rakyat, Edisi 27 Agustus 1998, Download Internet.
- Elqadri, Zainal, Mustafa, 2005, Ekonomi Ketenagakerjaan, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hukum, Pedia, 2009, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Internet.
- Nizamini, 2008, Beberapa Langkah Mengurangi Kemiskinan di Indonesia, Download Internet.
- Press Relases, 2009, http://www.bps.go.id/releases/Growth_National_Product/Bahasa-Indonesia, 27 Maret 2009.
- Primartantyo, Ukky, 2009, Swasta Telah PHK 100 Ribu Pekerja, Download: Selasa, 10-03- 2009
- Silaban, Rekson, 2003, Masalah Aktual Ketenagakerjaan dan Pembangunan Hukum di Indonesia, Download Internet.
- Sudjana, Eggi, 2000, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia.
- Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widiyanti, 1988, Masalah PHK dan Pemogokan, Jakarta: Bina Aksara.
- Auletta, Ken. 1998. The Highwaymen. San Diego: Harcourt Brace and Company.
- Baran, Stanley. 2004. Introduction to Mass Communiacion: Media Literacy and Culture. Boston: McGrawHill.
- Bardoel, Johannes and Leen d'Haenens. 2008. Reinventing Public Service Broadcasting in Europe: prospects, promises and problems. Media, Culture, and Society, Vol. 30 (3). Los Angeles: Sage Publication.
- Benson, Rodney and Daniel Hallin. 2007. "How States, Markets, and Globalization Shape the News." European Journal of Communication, London: Sage Publication.
- Deveroux. Eoin. 2003. Understanding the Media. Londong: Sage Publication.
- Dizard, Wilson Jr. 2000. Old Media, New Media: Mass Communications in the Information Age. New York: Longman
- Hills, Jill. 1998. "The US Rules, OK?" dalam McChesney et al. (eds), Capitalism and the Information Age: the Political Economy of the Global Communication Revolution. New York: Monthly Review Press.
- Jin, Dal Yong. 2008. "Neoliberal Restructuring of the Global Communiacion System: Mergers and Acquisitions." Media, Culture, and Society, Vol. 33 (3). Los Angeles: Sage Publication.
- McChesney, Robert. 1999. Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times. New York: The New Press.
- Mosco, Vincent. 1996. The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal. London: Sage Publication.
- Norris, Pippa. 2001. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. New York: Cambridge University Press.
- Turner, Ted. 2007. "Break Up This Band: How Government Protects Big Media and Shuts Out Upstarts Like

Me,” in *Mass Media*, Annual Edition 06/07, McGraw Hill’s Contemporary Learning Series.

_____, *Fortune*, edisi 21 Juli 2008.

_____, “Bangkrut Sebelum Musim Semi,” *Tempo*, 16-22 Maret, 2008.

www.asiaone.com/Business/News/Story/A1Story20090205-119531.html

www.startupbizhub.com/us-media-giant-announces-lay-off-plans.htm

http://en.ce.cn/subject/financialcrisis/financialcrisisf/200812/09/t20081209_17615856.shtml

Aditjondro, Goerge Junus, 2006, “Kebangkitan Gerakan Kiri di Amerika Latin”, Makalah Untuk Diskusi di Yayasan Tanah Merdeka, Kamis, 5 Januari.

Hatta, Mohamad, 1960, *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Penerbit Djakarta.

Heertz, Norena, 2003, “Hidup Di Dunia Material”, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.) *Neoliberalisme*, Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Kompas, 15 April 2005.

Kusumajati, Titus Odong, 2005, “Menjadi Bangsa yang Merdeka dan Bermartabat”, Sebuah Seminar di Universitas Sanata-Yogyakarta pada 9 Desember.

Magnis-Suseno, Franz, 1985. “Beberapa Masalah Etika Kemasyarakatan”, sebuah naskah yang belum diterbitkan dan menjadi bahan kuliah di STF Driyarkara-Jakarta, pada tahun 1980-an, hlm. 43.

Priyono, B. Herry 2003, “Dalam Pusaran Neoliberalisme”, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.) *Neoliberalisme*, Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Saksono, Ign. Gatut, 1986, “Gambaran Masyarakat dalam Marhaenisme”, Skripsi di STF Driyarkara, Jakarta.

Saksono, Ign. Gatut, 2007, *Marhaenisme Bung Karno*, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas.

Saksono, Ign. Gatut, 2008 a, *Keadilan Ekonomi dan Globalisasi*, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas.

Saksono, Ign. Gatut, 2008 b, *Pendidikan Yang Memerdekakan Siswa*, Yogyakarta : Rumah Belajar Yabinkas.

Wibowo, I, 2003, “Pendahuluan” dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.) *Neoliberalisme*, Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Yudotomo, Imam, 2007, “Sejarah Pemikiran dan Gerakan Sosialis di Eropa”, disampaikan pada sebuah seminar di Yogyakarta, bulan Desember.

